

# BAB VII.

## SISTEM PEMERINTAHAN.

- A. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN.
- B. MACAM – MACAM SISTEM PEMERINTAHAN.
- C. POKOK – POKOK SITEM PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN UUD1945

# BAB VIII.

## MASYARAKAT MADANI.

- A. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI.
- B. PINSIP-PRINSIP MASYARAKAT MADANI.
- C. UNSUR-UNSUR MASYARAKAT MADANI.
- D. SYARAT MASYARAKAT MADANI.
- E. PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI.

## **A. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN.**

Sistem Pemerintahan bisa diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Sistem Pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintah.

Secara luas Sistem Pemerintahan bisa diartikan sebagai sistem yang menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, menjaga fondasi pemerintah, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.

secara sempit sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari masyarakat.

Dapat di simpulkan Sistem Pemerintah bisa diartikan sebuah tatanan utuh yang terdiri dari bermacam-macam komponen pemerintah yang bekerja saling bergantung serta mempengaruhi dalam pencapaian fungsi dan tujuan pemerintah. Sistem ini bermanfaat untuk menjaga kestabilan pemerintah, pertahanan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

## B. MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN.

### 1. Sistem Pemerintahan Presidensial.

Merupakan sistem pemerintahan negara Republik dimana kekuasaan eksekutif di pilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan Legeslatif.

Menurut Rod Hague, Pemerintahan Presidensial terdiri dari 3 unsur.

- a. Presiden di pilih rakyat langsung, memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat yang terkait.
- b. . Presisen dengan DPR memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
- c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan legeslatif.

## Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial yaitu:.

1. Di kepalai oleh seorang presiden.
2. Kekuasaan Eksekutif Presiden di angkat berdasarkan demokrasi dan pemilu.
3. Presiden Mempunyai hak Prerogratif.
4. Menteri – Menteri diangkat dan di berhentikan oleh Presiden.
5. Kekuasaan Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legeslatif.
6. Kekuasaan Legeslatif tidak bisa di jatuhkan oleh Legislatif.

## Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial.

1. Badan Eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatn badan Eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
3. Masa jabatan legeslatif terbatas.

## Kekurangan sistem Pemerintahan Presidensial.

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan legislatif sehingga bisa dapat menciptakan kekuasaan yang muntlak.
2. Pembuatan Keputusan Memakan waktu yang lama.



## 2. Sistem pemerintahan Parlemen.

Sebuah Sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang mengangkat Perdana Menteri, Parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

## Ciri-Ciri Sistem Parlemen Yaitu:

1. Di kepalai oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh Presiden atau Raja.
2. Kekuasaan eksekutif Presiden ditunjuk legeslatif sedangkan raja di seleksi berdasarkan Undang-Undang.
3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif.
4. Menteri-Menteri hanya bertanggung jawab kepada Legeslatif.
5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada Legeslatif.
6. Kekuasaan eksekutif dapat di jatuhkan oleh legeslatif.

## Kekurangan Sistem Parlemen:

1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Sewaktu-waktu kabinet bisa bubar.
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen.
4. Parlemen dapat menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

## **Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlemen:**

1. Pembuat Kebijakan dapat di tangani secara cepat karena mudah terjadi Penyesuaian Pendapat antara eksekutif dan legeslatif. Karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau partai koalisi.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

### **3. Sistem Pemerintahan semipresidensial.**

adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua jenis sistem presidensial dan Sistem Parlementer.

#### **Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Semipresidensial.**

1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan Perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan.
2. Presiden Mempunyai hak Prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
3. Kekuasaan Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legeslatif.
4. Menteri-Menteri bertanggung jawab pada legeslatif.
5. Kekuasaan Eksekutif bertanggung jawab pada Legeslatif.
6. Masa Jabatan setiap pemegang kekuasaan akan berakhir dalam periode tertentu.

## **Kelebihan Sistem Pemerintahan Semi Presidensial.**

1. Menggabungkan dua jenis sistem Pemerintahan dengan mengambil kelebihan dari masing-masing sistem.
2. Pemerintahan berjalan lebih stabil karena pusat kekuasaan tersebar (tidak mudah terjadi perubahan yang tiba-tiba).
3. Presiden dan menteri tidak dapat dijatuhkan selama masa jabanya sehingga bisa fokus untuk menjalankan program kerjanya.

## Kekurangan Sistem semi Presidensial.

1. Suara rakyat terhadap pemegang kekuasaan terpilih kurang berpengaruh.
2. Sulit untuk mengetahui penyelewengan kekuasaan.
3. Pemerintah dapat dipengaruhi oleh partai politik jika pemenang diusung oleh partai tertentu.

## Negara yang menganut SemiPresidensial.

Palestina, Perancis, Romania, Russia, Tunesia, Ukraina.

Sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD RI 1945.

Berdasarkan UUD Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yakni sistem pemerintahan Negara Republik, di dalamnya kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, yuridikatif. Indonesia Menganut sistem pembagian kekuasaan.



Hubungan antara Sistem Pemerintahan yang ada di Indonesia dan Sistem Pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945.

Sejak Merdeka tahun 1945 sampai akhir tahun 1945 Indonesia mulai memberlakukan UUD 1945. Menurut Ketentuan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial.

# Beberapa Periode Sistem Pemerintahan di Indonesia.

## **1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949.**

Lama Periode : 18 Agustus 1945-27 Des 1949.

Bentuk Negara : Kesatuan.

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial.

Konstitusi : UUD 1945.

Datangnya sekutu dan dicetuskannya maklumat wakil presiden No.X tanggal 16 November 1945.

Isinya : pembagian kekuasaan dalam 2 badan,

1. Kekuasaan Legeslatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI).
2. Kekuasaan lainnya masih tetap di pegang oleh Presiden sampai tgl 14 Nopember 1945.
3. Kekuasaan eksekutif yang semula di jalankan oleh Presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari sistem pemerintahan Parlementer.

## **2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950.**

Lama periode : 27 Des 1949 -1950.

Bentuk Negara : Serikat (Federasi).

Bentuk Pemerintahan : Republik.

Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi  
Perlementer)

Kontitusi : RIS.

### **3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959.**

Lama periode : 15 agustus 1950- 5 Juli 1959.

Bentuk Negara : Kesatuan.

Bentuk Pemerintahan : Republik.

Sistem Pemerintahan : Parlemen.

Kontitusi : UUDS 1950.

Dekrit Presiden, terjadi perubahan Sistem Pemerintahan dari Parlementer ke Presidensial.

#### **4. Sitem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orla).**

Lama Periode : 5 Juli 1959 -22Februari 1966.

Bentuk Negara : Kesatuan.

Bentuk Pemerintahan : Republik.

Sistem Pemerintahan : Presidensial.

Konstutusi : UUD 1945.

## 5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998.

Lama Periode : 22 Februari 1966- 21 Mei 1998.

# Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik.

## Bentuk Pemerintahan : Pesidensial.

# Konstitusi UUD 1945.

## **C. Sistem Pemerintahan Negara RI berdasarkan UUD 1945. Sebelum amandemen.**

Tujuh (7) kunci Pokok sistem pemerintahan NRI.

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Reshtsstaat).
2. Sistem Konsitusional.
3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
4. Presiden adalah Penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah Pembantu presiden.
7. Kekuasaan Negara tidak tak terbatas.



# **Pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen.**

1. Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip otonomi daerah yang luas, Wilayah negara terbagi dalam beberapa propinsi.
2. Bentuk Pemerintahan adalah Republik, sedang Sistem Pemerintahan yaitu Presidensial.
3. Menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
4. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral).
6. Kekuasaan yudikatif di jalankan oleh MA dan badan dibawahnya.

# BAB VIII.

## MASYARAKAT MADANI.

- A. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI.
- B. PINSIP-PRINSIP MASYARAKAT MADANI.
- C. UNSUR-UNSUR MASYARAKAT MADANI.
- D. SYARAT MASYARAKAT MADANI.
- E. PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI.

## **A. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI.**

Kata Madani berasal dari bahasa Arab yang artinya Civil atau Civilized (beradab) Yang artinya masyarakat yang berperadaban.

**Masyarakat Madani ( Civil Society), dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan.**

**Masyarakat Madani ( Civil Society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan partisipasi aktif, serta masyarakat egaliter (sama, sederajat).**

Pada masa Aristoteles (384-322), Fase pertama sejarah wacana Civil Society. “Koinonia Politike” yakni sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan.

**Thomas Hobbes(1588-1679.**

**Sebagai antitesa Negara Civil Society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku Politik)**

Jhon Locke (1632-1704).

Civil Society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga Negara.

Fase Kedua. Tahun 1767 Adam Ferguson, Civil Society lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.

Fase Ketiga, 1792 Thomas Paine, Civil Society adalah Negara yang absah, masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama.

## Menurut Anwar Ibrahim.

Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kesetabilan masyarakat.

### Dawan Rahardjo mendefinisikan

**masyarakat** madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengaju pada nilai-nilai kebijakan bersama.

Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral emansipasi, mengakui hak asasi manusia, yang paling utama masyarakat yang demokratis.

## Tim nasional reformasi menuju Masyarakat Madani (Wiatapura).

Masyarakat madani (civil Society) di cirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter( masyarakat sama derajat), Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi.



Indonesia yang berdasarkan Pancasila konsep masyarakat Madani Indonesia secara Kualitatif di tandai oleh:

1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha Esa.
2. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
3. Penegaaan Rule of Law (aturan Hukum).
4. Partisipasi luas dari warga negara dalam pengambilan keputusan publik di berbagai level.
5. pelaksanaan pendidikan kewarganegaran untuk mengembangkan warga negara indonesia yang cerdas dan baik.

## **B. CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI.**

**Menurut Hikam ( 2003) ada empat (4) ciri utama Masyarakat Madani:**

- 1. Kesukarelaan.**
- 2. Keswasembadaan.**
- 3. Kemandirian yang tinggi terhadap Negara.**
- 4. Keterkaitan kepada nilai-nilai hukum yang di sepakati bersama. atau secara lebih lengkap ciri masyarakat dapat di kembalikan kepada ciri masyarakat Madinah di zaman Nabi Muhammad yang tertuang dalam piagam Madinah.**

## Ada 10 Prinsip dalam Piagam Madinah yang di maksud masyarakat Madani:

1. Kebebasan Bersama.
2. Persaudaraan Seagama.
3. Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama.
4. Saling Membantu.
5. Persamaan hak dan Kewajiban warga negara terhadap Negara.
6. Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara.
7. Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu.
8. Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran.
9. Perdamaian dan kedamaian.
10. Pengakuan hak atas setiap orang atau individu.

Secara khusus, Tilaar ( di kutip Landrawan 2005).

Menekankan bahwa pembangunan masyarakat madani dewasa ini terkait erat dengan proses demokrasi yang sedang proses demokratisasi yang sedang melanda seluruh dunia.

tilaar juga menambahkan ciri kas lain yang juga sama pentingnya adalah kebhinekaan bangsa Indonesia.

## **Winataputra (2005).**

Masyarakat madani bagi masyarakat Indonesia yang menjadi ciri khasnya adalah dalam sifatnya yang harus tetap agamis/religius dan adanya fasilitas yang lebih nyata dari negara, khususnya dalam 3 hal:

1. Memberikan Jaminian Hukum dan Dukungan Politik bagi kehadiran masyarakat madani.
2. Memupuk suasana kultural dan ideologis bagi lahir dan tumbuhnya masyarakat madani.
3. Menyediakan insfrastuktur sosial yang di perlukan serta memberikan fasilitas bagi tersedianya insfrastuktur tersebut.

## **Ciri-ciri lain masyarakat madani:**

1. Terdapat Norma dan Nilai-Nilai Sosial.
2. Memiliki Peradaban Maju.
3. Memberikan Ruang Pada Publik dengan bebas.
4. Memiliki Supremasi Hukum.
5. Terdapat Partisipasi Sosial.

## **C. UNSUR-UNSUR MASYARAKAT MADANI.**

Unsur-Unsur Pokok Masyarakat madani:

1. Adanya wilayah Publik yang luas.
2. Demokrasi.
3. Toleransi.
4. Pluralisme.
5. Keadilan Sosial.

## **D. SYARAT MASYARAKAT MADANI.**

Terdapat tujuh (7) syarat madani antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan juga kelompok yang berada di dalam masyarakat.
2. Berkembangnya human capital (modal manusia) dan sosial capital(modal sosial) yang kondusif untuk terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam setiap bidang pembangunan atau terbukanya akses berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya Persatuan antar kelompok di masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai antar budaya dan kepercayaan.



5. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam setiap forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat di kembangkan.
6. Terselenggaranya sistem Pemerintahan dan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya Jaminan, Kepastian, dan kepercayaan dari setiap jaringan-jaringan kemasyarakatan sehingga terjalinnya hubungan dan komunikasi antara masyarakat secara teratur, terbuka dan t erpercaya.

## **E. PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI.**

- 1. Lembaga swadaya masyarakat.**
- 2. Pers.**
- 3. Supremasi Hukum.**
- 4. Perguruan tinggi.**
- 5. Partai politik.**

**TERIMA KASIH**



**SELAMAT BELAJAR**